

SKRIPSI
PERAN LEMBAGA MASYARAKAT SIPIL DALAM PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI (STUDI KASUS PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA MATARAM)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERAN LEMBAGA MASYARAKAT SIPIL DALAM PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI (STUDI KASUS PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA MATARAM)



Disusun dan diajukan oleh:

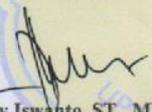
LALU PANJI ARDIANSYAH
NIM.21513A0051

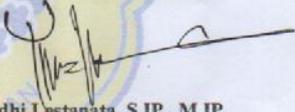
PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi
Mataram, 26 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

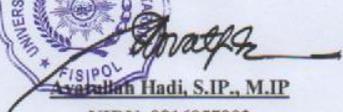

Dedy Iswanto, ST., MM
NIDN. 0818087901


Yudhi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui.

Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan




Aswahan Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN LEMBAGA MASYARAKAT SIPIL DALAM PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI (STUDI KASUS PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA MATARAM)



Disusun dan diajukan oleh
LALU PANJI ARDIANSYAH
NIM.21513A0051

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: **Jum'at, 26 Juli 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

- | | | |
|---|------------|---------|
| 1. <u>Dedy Iswanto, ST., MM</u>
NIDN. 0818087901 | Ketua | (.....) |
| 2. <u>Yudhi Lestana, S.IP., M.IP</u>
NIDN. 0827118801 | Anggota 1 | (.....) |
| 3. <u>Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP</u>
NIDN. 0816057902 | Anggota II | (.....) |

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Drs. AMIL, M.M
NIDN. 0831126204

PERNYATAAN

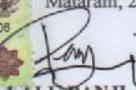
Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Lalu Panji Ardiansyah

Nim : 21513A0051

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lain).
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

 Mataram, 26 Juli 2019

LALU PANJI ARDIANSYAH
NIM : 21513A0051

MOTTO

*Cobalah dulu, baru bercerita.
Pahamilah dulu, baru menjawab.
Pikirlah dulu, baru berkata.
Dengarlah dulu, baru beri penilaian.
Bekerjalah dulu, baru berharap.
(Socrates)*



PERSEMBAHAN

Dengan hati yang dipenuhi cinta dan ketulusan, ku persembahkan kepada kedua orang tua ku :

AYAHANDA LALU SYAPII

DAN

IBUNDA TITIN JULIANA TAMBUNAN

SERTA KU DEDIKASIKAN UNTUK

KEBERLANGSUNGAN ILMU PENGETAHUAN



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Masyarakat Sipil Dalam Pendidikan Anti Korupsi Studi Kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram”** dengan lancar dan tepat waktu.

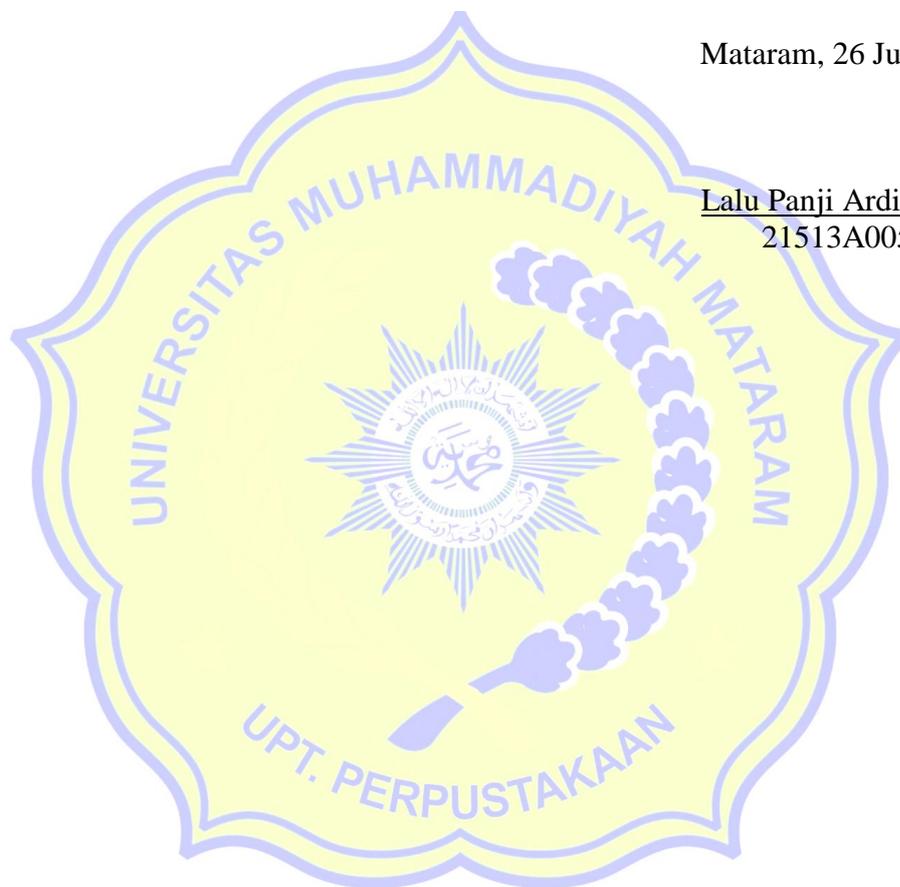
Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dedi Iswanto S.T., MM selaku Dosen Pembimbing Utama
2. Bapak Yudhi Lestanata S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, *support*, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Untuk kedua orang tua saya, Lalu Syapii dan Titin Juliana Tambunan. Terima Kasih untuk segalanya. Semoga Tuhan Meridhai apa yang telah kalian lakukan dan perjuangkan untuk ku.
4. Untuk seseorang sahabat, Jody Agustin Kusuma. Kita adalah bukti bahwa persahabatan adalah sesuatu yang lebih kuat daripada ideologi, agama, bahkan bangsa dan negara. Terimakasih untuk segalanya.
5. Untuk teman-teman sekomplotan ku, Abd Hayyi, Lalu Nanang Alwi, Lalu Reza Fahlevi, Muhammad Rudi Hadi, dan Guntur Merdika Hadi. Terima Kasih atas inspirasi dari secangkir kopi dan asap kretek.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan berikutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini memiliki manfaat untuk rekan-rekan yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan ilmu sosial dan politik.

Mataram, 26 Juli 2019

Lalu Panji Ardiansyah
21513A0051



PERAN LEMBAGA MASYARAKAT SIPIL DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (STUDI KASUS PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MATARAM)

LALU PANJI ARDIANSYAH
21513A0051

ABSTRAK

Selama ini terdapat anggapan bahwa sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai akibat pemahaman bahwa korupsi adalah budaya bangsa. KPK mencatat terdapat 10 Hakim, 12 kepala lembaga atau kementerian, 4 duta besar, 7 komisioner, 10 gubernur, 35 Wali Kota atau Bupati, 114 pejabat eselon, 74 anggota DPR/DPRD yang ditangani KPK sepanjang 2007-2014. Melihat kondisi korupsi di Indonesia hingga sampai saat ini, banyak sekali pekerjaan besar bagi pemerintahan saat ini dalam memberantas korupsi. Namun disisi lain pemerintah tidak sekedar memberantas, menindaklanjuti, serta menanggulangi kasus korupsi yang ada. Melainkan melakukan pencegahan korupsi melalui peran masyarakat dalam pendidikan anti korupsi.

Penelitian ini menggunakan teori pendidikan anti korupsi (Agus Wibowo 2008), teori tujuan pendidikan anti korupsi (Salahudin 2018), teori peran dan faktor yang mempengaruhi ormas dalam pendidikan anti korupsi (Maksum 2004), dan teori organisasi masyarakat (Fakih 2000) sebagai analisis peneliti, karena organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Mataram merupakan kelompok sosial, pendidikan, dan agama yang memiliki peran dalam pendidikan anti korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Kesimpulan penelitian ini adalah ormas Nahdlatul Ulama Kota Mataram yang merupakan kelompok Sosial, pendidikan, dan agama memiliki aspek peran dalam pendidikan anti korupsi yakni, partisipasi anti korupsi dan media anti korupsi. Dalam hal ini ormas Naahdlatul Ulama Kota Mataram memiliki faktor yang mempengaruhi yakni, faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : Organisasi Masyarakat, Pendidikan Anti Korupsi

**THE ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN ANTI
CORRUPTION EDUCATION (CASE STUDY OF THE MANAGER OF
NAHDLATUL ULAMA BRANCH OF MATARAM CITY)
LALU PANJI ARDIANSYAH
21513A0051**

ABSTRACT

So far there has been an assumption that the difficulty of eradicating corruption in Indonesia is a result of an understanding that corruption is the nation's culture. The KPK noted that there were 10 Judges, 12 heads of institutions or ministries, 4 ambassadors, 7 commissioners, 10 governors, 35 mayors or regents, 114 echelon officials, 74 DPR / DPRD members handled by the KPK during 2007-2014. Seeing the condition of corruption in Indonesia to date, there is a lot of great work for the current government in combating corruption. But on the other hand the government is not just eradicating, following up, and tackling existing corruption cases. But prevention of corruption through the role of the community in anti-corruption education.

This study uses the theory of anti-corruption education (Agus Wibowo 2008), the theory of anti-corruption education goals (Salahudin 2018), the theory of the role and factors that influence mass organizations in anti-corruption education (Maksum 2004), and the theory of community organizations (Fakih 2000) as an analysis of researchers. Because the Nahdlatul Ulama Mataram City community organization is a social, educational and religious group that has a role in anti-corruption education.

This study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Descriptive analysis methods are used to get a systematic, factual and accurate picture of the facts, the characteristics and the relationship between the phenomena under investigation. Descriptive analytical method is a method that serves to describe or provide a description of the object under study through data or samples that have been collected as they are.

The conclusion of this study is that the Nahdlatul Ulama mass organization in Mataram City, which is a social, educational and religious group, has an aspect of role in anti-corruption education, namely, anti-corruption participation and anti-corruption media. In this case the Nahdlatul Ulama mass organization in Mataram City has influential factors namely internal and external factors.

Keywords: Community Organizations, Anti-Corruption Educat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii-
viii	
ABSTRAK	ix-x
DAFTAR ISI.....	xi-
xii	
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	12
2.3 Kerangka Pikir	24

2.4 Definisi Konseptual	24
2.5 Definisi Oprasional.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian	28
3.3 Sumber Data	28
3.4 Pemilihan Narasumber	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	34
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	38
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Daftar Responden Penelitian	28
Tabel 4.1 Partisipasi Anti Korupsi	40
Tabel 4.2 Kegiatan LAKPASDAM NU Kota Mataram Dalam Pendidikan Anti Korupsi	42
Tabel 4.3 Metode Partisipasi Anti Korupsi Yayasan Pendidikan NU Kota Mataram.....	43
Tabel 4.4 Mata Pelajaran Partisipasi Anti Korupsi	44
Tabel 4.5 Media Anti Korupsi NU Kota Mataram.....	46
Tabel 4.6 Sosialisasi Melalui Peran Media Online NU Kota Mataram	48
Tabel 4.7 Dstribusi Buku Dan Modul Pencegahan Anti Korupsi NU Kota Mataram.....	50
Tabel 4.8 Kegiatan Advokasi Pencegahan Anti Korupsi	52
Tabel 4.9 Daftar Program Memerangi Korupsi.....	54
Tabel 4.10 Jadwal Program Ma'jlis Taklim Memerangi Korupsi	56
Tabel 4.11 Pemberitaan Kritikan Dan Tuntutan Oleh Organisasi NU Kota Mataram.....	58
Tabel 4.12 Mukhtamar Nahdlatul Ulama	60
Tabel 4.13 Program Penanaman Semangat Anti Korupsi Dalam Membangun Nilai-Nilai Anti Korupsi.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Muhlizi (2014) menyebut Selama ini terdapat anggapan bahwa sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai akibat pemahaman bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Pemahaman ini diperkuat dengan banyaknya kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. KPK mencatat terdapat 10 Hakim, 12 kepala lembaga atau kementerian, 4 duta besar, 7 komisioner, 10 gubernur, 35 Wali Kota atau Bupati, 114 pejabat eselon, 74 anggota DPR/DPRD yang ditangani KPK sepanjang 2007-2014. Bahkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2013 menunjukkan sebanyak 290 kepala daerah sudah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus. Di antara kasus tersebut sebanyak 251 orang kepala daerah atau sekitar 86,2 persen terjerat kasus korupsi.

Egi Primayoga (2018), menyebut dalam kurun waktu 14 tahun ada 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK, serta pada tahun 2004 dan 2005 itu ada masing-masing 1 kepala daerah. Dari catatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*), tahun 2014 dan 2018 tercatat sebagai sejarah kelam, sebab banyak kepala daerah yang ditangkap KPK di tahun itu. Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus kepala daerah, disusul tahun 2014 dengan 14 kasus kepala daerah yang ditangani.

Dalam pengaturan tindak pidana korupsi menurut undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomer 30 Tahun 2001. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Undang-Undang yang

mengatur hal – hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, baik mencakup Pengertian tindak pidana Korupsi, Bentuk-Bentuk Korupsi, Subjek Hukum Korupsi dan Pertanggung jawaban pidana korupsi. Secara Umum Korupsi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang diartikan adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (UU No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang N0. 20 Tahun 2001).

Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan kedalam 7 jenis kelompok pokok yaitu (a) Kerugian keuangan negara, (b) Suap-Menyuap, (c) Penggelapan dalam Jabatan , (d) Pemerasan, (e) Perbuatan curang, (f) Benturan kepentingan dalam pengadaan dan (g) Gratifikasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi subjek hukum didalamnya adalah (a) korporasi, (b) pegawai negeri, dan (c) setiap orang adalah perseorangan dan korporasi. Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berupa Sanksi pidana berupa kurungan, penjara, dan denda, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. (UU No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang N0. 20 Tahun 2001).

Pemahaman bahwa korupsi adalah budaya bangsa berdasarkan data di atas perlu diluruskan dengan menunjukkan bahwa budaya bangsa Indonesia adalah

anti terhadap korupsi. Untuk dapat memahami hal ini perlu ada pemahaman juga bahwa Indonesia adalah Negara yang bersifat pluralistik baik suku, budaya, bahasa, kepercayaan maupun agama. Mengingat sangat beragamnya budaya yang tersebar di Indonesia maka budaya nusantara harus diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial.

Transformasi budaya nusantara ke dalam format pembangunan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, bersumber dari dua elemen penting: *pertama*, yang dihasilkan dari nilai-nilai agama; dan *kedua*, yang dihasilkan dari nilai-nilai adat. Budaya nusantara yang bersumber dari nilai agama antara lain dapat dilihat dari pandangan Islam yang menyatakan bahwa: “Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan *zhalim* (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru.

Melihat kondisi korupsi di Indonesia hingga sampai saat ini, banyak sekali pekerjaan besar bagi pemerintahan saat ini dalam memberantas korupsi. Namun disisi lain pemerintah tidak sekedar memberantas, menindaklanjuti, serta menanggulangi kasus korupsi yang ada. Melainkan melakukan pencegahan korupsi melalui peran masyarakat dalam pendidikan anti korupsi.

Menurut Alim (*et al.*, 2016: 157), peran masyarakat dalam keterlibatan pendidikan anti korupsi dapat dilakukan pemerintah melalui kerjasama dengan CSO (*Civil Society Organisation*), khususnya organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang mendukung penuh penguatan pencegahan korupsi ini. Wawasan tentang anti korupsi tidak boleh hanya menjadi pengetahuan tetapi harus menginternalisasi menjadi nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan.

Sehingga banyak berbagai dari kalangan ormas menyuarakan anti korupsi , salah satunya Nahdlatul Ulama Cabang Kota Mataram yang mengemukakan bahwa: (1) Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan penghianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*), perampokan (*nahb*); (2) Pengembalian uang korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke Negara merupakan hak masyarakat (hak *adamiy*). (3) *Money politics* sebagai pemberian (berupa uang atau benda lain) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif dalam pandangan syariat merupakan suap (*risywah*) yang dilaknat Allah, baik yang memberi (*rasyi*), yang menerima (*murtasyi*), maupun yang menjadi perantara (*raaisyi*).

Melihat berbagai fenomena tindakan korupsi di Indonesia yang melibatkan para pejabat daerah, melalui peranan organisasi masyarakat sipil pemerintah dapat melakukan kerjasama melalui pendidikan anti korupsi, Penelitian ini mengambil objek penelitian pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Kota Mataram,

yang merupakan organisasi *alsunah waljama'ah* yang bergerak dibidang organisasi pengkaderan, keagamaan, pendidikan, dan sosial masyarakat.

Terlebih terdapat agenda pencegahan dan pendidikan anti korupsi yang diperkuat oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram, baik secara Individu, organisasi, maupun komunitas. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil di kota Mataram mengemban tugas dan fungsionalnya dalam memberikan pendidikan anti korupsi untuk masyarakat sipil, sehingga pendidikan antikorupsi ini bisa meminimalisir terjadinya KKN (*korupsi, kolusi, dan nepotisme*) di lingkungan pemerintah kota Mataram, terutama kader-kader Nahdlatul Ulama Kota Mataram yang mengemban jabatan di ruang lingkup pemerintahan Kota Mataram.

Nahdlatul Ulama Kota Mataram sebagai organisasi masyarakat sipil memiliki aspek dalam bidang usaha pendidikan, agama, sosial, dan budaya yang dapat mampu mempengaruhi jama'ah, kader- kadenya, hingga santri di lingkungan pendidikan pondok peantren nahdlatul ulama dalam melaksanakan peran dan fungsinya, oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas penulis menarik untuk mengadakan penelitian peran organisasi masyarakat sipil dalam upaya pendidikan anti korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram sebagai representasi dari masyarakat sipil dalam peran pendidikan anti korupsi, dengan judul: **”Peran Lembaga Masyarakat Sipil Dalam Pendidikan Antikorupsi (Studi Kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari gambaran diatas penulis mencoba mengkaji:

1. Bagaimanakah peran organisasi masyarakat sipil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi?
2. Faktor–faktor yang mempengaruhi organisasi masyarakat sipil pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran organisasi masyarakat sipil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi?
2. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi organisasi masyarakat sipil pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pejuang organisatoris dalam mengembangkan organisasinya dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi

2. Secara praktis, penelitian ini dapat melihat resolusi jihad NU dalam berkontribusi memperjuangkan nilai-nilai sosial, agama dan pendidikan yang tinggi untuk kemaslahatan ummat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah dibuat dan dianggap cukup relevan serta untuk mencari perbandingan. Terlebih untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Anissa Reayana 2014	Peranan Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi	Deskriptif Kualitatif	Peran dari ICW dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi juga terus dilakukan dengan cara menyediakan alat atau buku panduan pengawasan korupsi di berbagai sektor (SDA, kehutanan, pelayanan publik, dan hukum). Selain itu ICW juga melakukan	Penelitian terdahulu lebih fokus pada Indonesia Corruption Watch us sebagai representasi masyarakat sipil pengawasan dan pelatihan pada kelompok masyarakat, sedangkan dalam penelitian proposal skripsi ini penulis lebih mengarah atau fokus pada

				<p>pelatihan, pendampingan maupun sosialisasi bagi kelompok masyarakat.</p>	<p>Organisasi PC Nahdlatul Ulama Kota Mataram Sebagai Representasi masyarakat sipil dalam melakukan peran dan fungsioanaitas dalam memberikan advokasi dan ke-ikutsertan dalamterlibat dalam pendidikan antikorupsi dan pemberantasan korupsi</p>
2	<p>Gatut Priowido do 2017</p>	<p>Model Komunikasi Dan Strategi Kebijakan Kesadaran Anti Korupsi Melalui Pendekatan Character Buiding Berbasis Literasi Media</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>memperoleh diskripsi tentang tingkat kognisi pendidikan kesadaran antikorupsi melalui pendekatan <i>Character Building</i> berbasis literasi media bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada sekolah-sekolah yang dikelola lembag pendidikan Kristen dan Islam di Surabaya</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih fokus pada pendidikan kesadaran antikorupsi melalui pendekatan character building berbasis literasi media, sedangkan dalam proposal skripsi yang berjudul peran masyarakat sipil dalam pendidikan</p>

					<p>anti korupsi studi kasus Organisasi PC Nahdlatul Ulama Kota Mataram. Lebih fokus dalam pendidikan anti korupsi berbasis Al-sunnah waljama'ah, memberikan penyadaran dan pencerahan melalui pengajian umum, dan mencetak kader penyuluh antikorupsi</p>
3	Lissa Solehatun Rosida 2016	Pendidikan Anti Korupsi Di SMAN 1 Sigaluh Banjarnegara	Deskriptif Kualitatif	<p>Dari penelitian tersebut peneliti memberikan saran kepada pihak sekolah untuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat luas agar menjadi panutan disekolah lain, Pihak sekolah perlu adanya komunikasi yang lebih inten dengan masyarakat sekitar agar terwujudnya suatu kesepakatan bersama dalam menjaga norma-norma perilaku dan inetraksi</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus pada saran kepada pihak sekolah untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat luas agar menjadi panutan sekolah pendidikan anti korupsi, sedangkan dalam penelitian proposal</p>

				dilingkungan sekolah yang selaras dengan pendidikan anti korupsi.	skripsi yang berjudul peran masyarakat dalam pendidikan antikorupsi ini. Penulis lebih focus menguatkan pendidikan integritas Aswaja dan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan kader dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama Kota Mataram
4	Fitri Fauziyah (2015)	Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Al-Quran: Kejujuran, Tanggung Jawab Dan Kesederhanaan	Deskriptif Kualitatif	tujuan pendidikan Islam tidak hanya berpusat pada penguasaan konsep-konsep dan keterampilan	Lebih fokus pada tujuan pendidikan islam mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi di al-qur'an, sedangkan dalam penelitian proposal skripsi yang berjudul peran masyarakat dalam pendidikan antikorupsi ini. Penulis

					lebih focus menguatkan pendidikan integritas Aswaja dan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan kader dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama Kota Mataram
--	--	--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Peran

2.2.1.1 Definisi Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarwono: 2015).

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu

posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (Edi Soehardono: 2000).

2.2.1.2 Aspek- aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu (Sarwono, 2015):

- a. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
 - b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
 - c. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
 - d. Kaitan antara orang dan perilaku
1. Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut (Sarwono, 2015):

- a. *Aktor* atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. *Target* (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self* (Sarwono, 2015).

2. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :

a. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu (Sarwono, 2015).

b. Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut (Sarwono, 2015) : (1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. (2) Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran.

2.2.2 Masyarakat Sipil (Civil Society)

2.2.2.1 Definisi Masyarakat Sipil (Civil Society)

Sebagaimana diketahui dari kesejarahan bangsa-bangsa yang telah maju dan demokratis, keberadaan civil society yang kuat merupakan salah satu landasan pokok bagi ditegakkannya sistem politik demokrasi. Civil society di sini didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian berhadapan dengan negara. Civil society menjadi penting ia dapat menjadi benteng yang

menolak intervensi negara yang berlebihan melalui berbagai asosiasi, organisasi dan pengelompokan bebas di dalam rakyat serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas (the free public sphere). Melalui kelompok-kelompok mandiri itulah rakyat dapat memperkuat posisinya vis-à-vis negara dan melakukan transaksi-transaksi wacana sesamanya. Sedangkan melalui ruang publik bebas, rakyat sebagai warga negara yang berdaulat baik individu maupun kelompok dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap negara (Azra: 2004)

Masyarakat sipil yang melingkupi kehidupan sosial terorganisasi dengan terbuka, sukarela, dan lahir secara mandiri. Masyarakat secara otonom berswadaya secara parsial dengan tatanan legal atau seperangkat nilai bersama. Masyarakat sipil sebagai penengah, berdiri diantara ruang privat dan negara bukan sebagai masyarakat ekonomi yang memiliki tujuan utama mencari keuntungan, namun adalah untuk menciptakan norma dan pola keterlibatan kultural yang dapat meluas ke ruang publik (Larry Diamond: 2003).

2.2.3 Organisasi Masyarakat Sipil

2.2.3.1 Definisi Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Government Organisation (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam bernegara. Organisasi masyarakat merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung atau menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ada beberapa jenis organisasi

yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan didasarkan pada profesi (Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Desember 2016). Organisasi masyarakat merupakan bagian dari masyarakat sipil yang menurut Mouelis Halili (2006) untuk turut menciptakan penegakan hukum yang efektif demi melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Secara ideal, Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang dimana berperan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternative pembangunan, dan mengemban amanah sebagai agen penyambung lidah rakyat yang bisa menjadi tali hubungan antara masyarakat dan pemerintah (Fakih: 2000).

2.2.3.2 Fungsi Organisasi Masyarakat Sipil

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat,
- h. berbangsa, dan bernegara.

Menurut (Mitsuo 2001), dalam konteks Indonesia, kebangkitan masyarakat sipil akhir-akhir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pertumbuhan ekonomi yang meningkat terutama pada era Orde Baru, kemunculan kelas menengah, kebangkitan gerakan-gerakan pertentangan terhadap rezim Orde Baru, dan meningkatnya tuntutan demokratisasi. Keempat factor tersebut juga turut didorong oleh globalisasi ekonomi dan penggunaan teknologi informasi yang pesat.

2.2.3.3 Sifat Organisasi Masyarakat Sipil

a. Sukarela

Organisasi Masyarakat sipil adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya (Ichsan Malik 2004:7).

b. Swadaya

Menurut (Salamon 2000), Hadiwinata mendefinisikan organisasi masyarakat sipil memiliki sifat swadaya, yaitu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Formal, artinya secara organisasi bersifat permanen, mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur;

2. Swasta, artinya kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah;
3. Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan (profit) kepada direktur atau pengurusnya;
4. Menjalankan organisasinya sendiri (self-governing), yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar;
5. Sukarela (voluntary), yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu

c. Mandiri

Nurcholis Majid (2000), menyebutkan beberapa sifat organisasi masyarakat sipil salah satunya bersipat mandiri, sebagaimana organisasi masyarakat sipil berdiri secara mandiri tanpa intervensi dari pemerintah. Organisasi masyarakat sipil yang bersipat non Government ini akan bisa melaksanakan program-program yang tanpa ada keterkaitan dengan pemerintah, sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari organisasi masyarakat sipil itu sendiri.

2.2.4 Pendidikan Anti Korupsi

2.2.4.1 Definisi Pendidikan Anti Korupsi

Agus Wibowo (2013) berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Bahwa program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk

membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi.

Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi (Hartoto, 2008)

2.2.4.2 Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku anti korupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 tahun 2003. Sisdiknas pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Menurut Salahudin (2018), ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan antikorupsi, yaitu:

1. Menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, semangat antikorupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan membangun bangsa yang tertunda karena adanya korupsi tidak terjadi lagi pada masa depan;

2. Membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi.

2.2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ormas Dalam Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah merupakan tujuan utama dari berdirinya sebagai salah satu organisasi yang merepresentasikan *civil society* dalam upaya pemberantasan korupsi. Bentuk dari peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat ini adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan, penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. Berikut factor-faktor yang mempengaruhi pendidikan anti korupsi Menurut (Maksum 2004).

1. Faktor Eksternal

- a. **Penanaman Semangat Anti Korupsi. Dalam Membangun Kesadaran Nilai-Nilai Anti Korupsi**

Menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan anti korupsi, semangat antikorupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan membangun bangsa yang tertunda karena adanya korupsi tidak terjadi lagi pada masa depan. nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil dalam melawan korupsi. Dengan demikian, bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan

Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Organisasi Masyarakat Sipil melainkan tanggung jawab setiap warga masyarakat Indonesia

2. Faktor Internal

a. Program-Program Yang Bersifat Memerangi Anti Korupsi

Organisasi Masyarakat Sipil memiliki bidang-bidang pemberdayaan dan pendidikan, sehingga Program yang berispat memerangi korupsi dilakukan melalui pendekatan-pendekatan emosional dalam bentuk pendidikan-pendidikan anti korupsi.

b. Sebagai penyambung aspirasi rakyat terhadap pemerintah

Organisasi Masyarakat Sipil Sebagai organisasi penengah, sehingga Ormas sipil menjadi refresentasi masyarakat sipil, yang dimana mampu menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat dengan pemerintah lebih khususnya dalam memerangi korupsi itu sendiri.

2.2.5 Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pendidikan Anti Korupsi

Maksum (2004) Peran serta organisasi masyarakat dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :

- a. Peran serta melalui media Koran, majalah, radio, dan televise merupakan media yang ampuh dalam mencegah dan menaggulangi korupsi. Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat Negara dapat diberitakan melalui media. Oleh lembaga berwenang, hasil pemberitaan

dapat ditindak lanjuti. Melalui media, warga juga dapat menyampaikan adanya dugaan korupsi.

b. Peran serta sebagai kekuatan pengimbang peran serta organisasi masyarakat sebagai kekuatan pengimbang dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

1. Advokasi kebijakan lewat lobi.

2. Membuat pernyataan politik

3. Membuat pernyataan lewat petisi

4. Aksi demonstrasi

c. Peran serta sebagai pemberdaya masyarakat, melalui :

1. Aksi pengembangan kapasitas kelembagaan

2. Mengembangkan kesadaran masyarakat

3. Membangun partisipasi masyarakat

4. Memberikan pendidikan kepada masyarakat

d. Peran serta sebagai lembaga perantara, melalui :

1. Masyarakat dengan pemerintah atau negara, masyarakat dengan LSM

2. LSM dengan masyarakat

3. Melakukan pendekatan lewat lobi

4. Melakukan koalisi

5. Mendampingi warga

6. Bekerjasama antar pelaku-pelaku dalam pelaksanaan hubungan nasional maupun internasional

2.2.5.1 Sosialisasi Anti Korupsi Oleh Organisasi Masyarakat Sipil

Menurut Maksum (2004), sosialisasi Anti korupsi sebagai salah satu cara organisasi masyarakat sipil dalam porgres memerangi korupsi lebih khususnya di ruang lingkup Ormas, berikut bentuk dari sosialisasi anti korupsi yang dilakukan oleh Ormas yaitu :

- a. Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi, dengan basis pendidikan dan Partisipasi anti korupsi.
- b. Memberikan penyadaran dan pencerahan terus menerus perihal sikap dan perilaku anti korupsi kepada masyarakat melalui media

2.2.5.2 Advokasi Anti Korupsi Oleh Organisasi Masyarakat Sipil

Menurut Maksum (2004), pencegahan korupsi adalah suatu alat untuk melaksanakan suatu tindakan (aksi), merupakan ikhtiar politis yang memerlukan perencanaan yang cermat untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Diperlukan langkah-langkah sistematis dengan melibatkan “masyarakat” bervariasi tergantung. Masyarakat atau suatu komunitas tertentu terlibat dalam pendidikan anti korupsi, tetapi di lain waktu bisa juga berperan sebagai saluran advokasi itu sendiri dan pada saat lain bisa berperan sebagai kelompok yang diwakili oleh seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Berikut bentuk advokasi anti korupsi yaitu:

- a. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan korupsi dan korporasi, gerakanya berpegang teguh pada prinsip dasar pemeberantasan korupsi sehingga menghilangkan keresahan yang terfokus pada pencegahan korupsi

2.3 Kerangka Pikir



2.4 Definisi Konseptual

- a. Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran. (Edi Soehardono: 2000).
- b. Civil society di sini didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian berhadapan dengan negara. Civil society menjadi penting ia dapat menjadi benteng yang menolak intervensi negara yang berlebihan melalui berbagai asosiasi, organisasi

dan pengelompokan bebas di dalam rakyat serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas (the free public sphere). Melalui kelompok-kelompok mandiri itulah rakyat dapat memperkuat posisinya vis-avis negara dan melakukan transaksi-transaksi wacana sesamanya (Azra: 2004).

- c. Organisasi masyarakat merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung atau menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan organisasi didasarkan pada profesi. (Halili: 2016)
- d. Agus Wibowo (2013) berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Bahwa program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi.

2.5 Definisi Oprasional

- A. Aspek Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pendidikan Anti Korupsi
 1. Sosialisasi Anti Korupsi
 - a. Partisipasi Anti Korupsi
 - b. Sosialisai Media Anti Korupsi

2. Advokasi Anti Korupsi

a. Pencegahan Korupsi

B. Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pendidikan Anti Korupsi

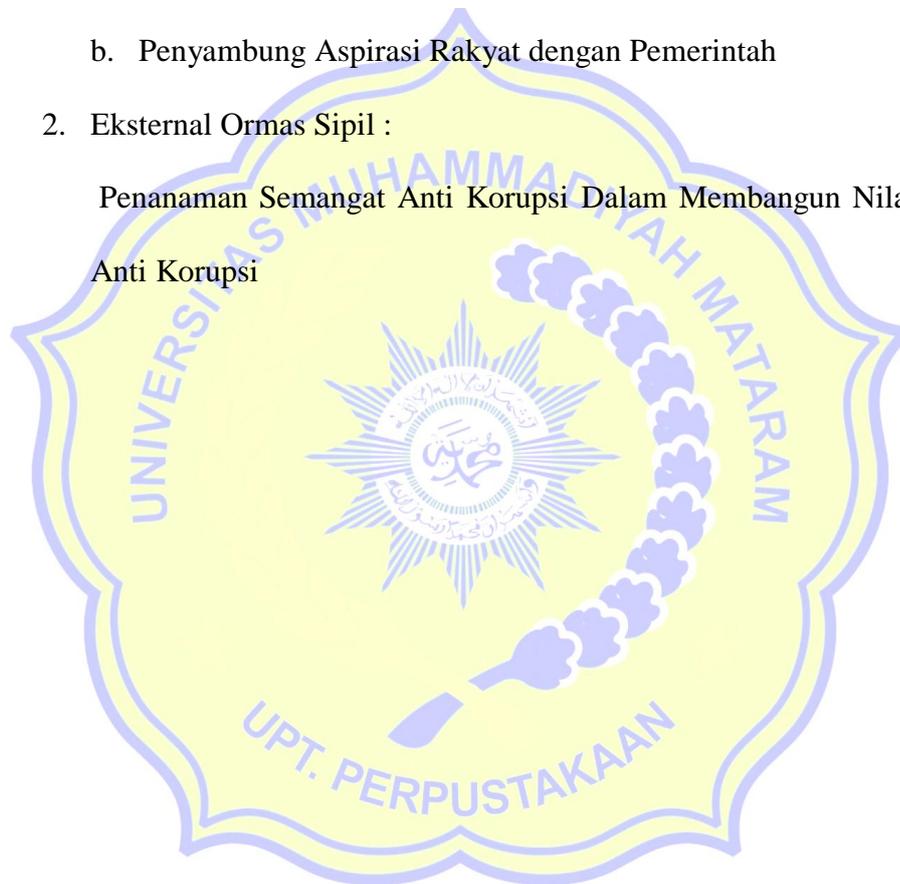
1. Internal Ormas Sipil :

a. Program yang bersifat Memerangi Korupsi

b. Penyambung Aspirasi Rakyat dengan Pemerintah

2. Eksternal Ormas Sipil :

Penanaman Semangat Anti Korupsi Dalam Membangun Nilai-Nilai Anti Korupsi



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu karya ilmiah seperti paper, makalah, lebih-lebih skripsi dan desertasi sangatlah mutlak adanya dan tidaklah berlebihan. Tanpa metodologi dalam suatu kerangka karya ilmiah akan kehilangan arah pembahasannya atau tidak mempunyai ujung pangkal serta dapatlah diragukan kadar ilmiahnya.

Penelitian yang dilakukan secara ilmiah merupakan suatu cara kerja atau metode kerja yang sistematis (dilakukan secara terencana dan cermat) untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menemukan suatu fakta dan kesimpulan yang dapat dipahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan (Djama'an dkk, 2009 :11).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

Menurut arikunto (2010 :5), metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram dilakukan pada bulan juni sampai bulan Juli 2019. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

3.3. Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

Menurut ridwan (2008: 69), sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

N0	Narasumber	Metode	Jumlah
1	Ketua Tandfiziyah PCNU Kota Mataram	Wawancara	1 orang
2	A'wan PCNU Kota Mataram	Wawancara	1 orang

3	Rais Syuriyah NU Kota Mataram	Wawancara	1 Orang
4	Ketua LAKPASDAM PCNU Kota Mataram	Wawancara	1 Orang
5	Ketua Yayasan Pendidikan NU Kota Mataram	Wawancara	1 Orang
6	Kominfo Media NU Online	Wawancara	1 Orang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literature, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari proser belajar mengajar.

3.4. Pemilihan Narasumber

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang di pilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto : 2000 : 34). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Tandfiziyah PC NU Kota Mataram
2. A'wan PC NU Kota Mataram
3. Rais Syuriyah NU Kota Mataram

4. Ketua LAKPASDAM PC NU Kota Matram
5. Kominfo Media NU Online
6. Ketua Yayasan Pendidikan NU Kota Mataram

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah :

- a. Teknik observasi (pengamatan)

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (ridwan, 2008 : 72).

Dari pendapat ridwan diatas dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang berkembang di lapangan sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis agar fenomena di lokasi penelitian tidak ada yang ketinggalan.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan (djam'an satori dan aan komariah, 2009 : 47).

Dalam penelitian ini, wawancara struktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penelitian atau pengumpulan data mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dan pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan jawaban alternatif juga sudah disiapkan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (ridwan, 2008 : 77).

Dengan teknik ini peneliti bisa mendapatkan data-data terkait dengan data-data yang berkaitan peran Nahdlatul Ulama Kota Mataram dalam pendidikan anti korupsi.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus terus mengakibatkan data tunggal. Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (sugiyono, 2013 :243). Bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara lain tertentu yang

dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda.

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan miles dan humberman (1984) dalam sugiyono, 2013 : 246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori diagram aliran (*flowchard*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drowing*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada akan bukti-bukti yang kuat, yang akan mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan mudah ditangkap maknanya (Sugiono, 2014 : 91-99).

